

TANTAGAN DAN SOLUSI SISTEM PENGELOLAAN DANA PENDIDIKAN DI ERA DIGITAL

Sabeni¹, Ujang Suherman², Apriliantoni³

¹ Universitas Islam 45 Bekasi, Indonesia

² Universitas Islam 45 Bekasi, Indonesia

³ Universitas Islam 45 Bekasi, Indonesia

Email : masalkahfi123@gmail.com¹ , nurulsuherman@gmail.com² , apriliantoni@unisma.ac.id³

DOI: <https://doi.org/10.46773/muaddib.v7i1.1465>

Abstract :

Management of education funds is the most important and strategic element in realizing equal access and improving the quality of education in Indonesia. This research aims to identify the main challenges and solutions in managing education funds in Indonesia. The method in this research uses a qualitative approach based on literature studies. This study analyzes various relevant scientific journals, and compares fund management systems in several regions in Indonesia and developed countries such as Finland and Singapore. The results of this research show that the management of education funds in Indonesia still faces major challenges, especially in terms of uneven distribution, low transparency and suboptimal efficiency. Digitalization of the transparency system, enforcement of regulations, and involvement of local communities have proven to be effective strategies for improving the management of education funds.

Keywords: Challenges, Solutions, Funds, Education

Abstrak:

Pengelolaan dana pendidikan merupakan elemen yang paling penting dan strategis dalam mewujudkan pemerataan akses dan peningkatan kualitas pendidikan di Indonesia. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi tantangan utama dan solusi strategis dalam pengelolaan dana pendidikan di Indonesia. Metode dalam penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif berbasis studi literatur, studi ini menganalisis berbagai jurnal ilmiah yang relevan, serta membandingkan sistem pengelolaan dana di beberapa daerah Indonesia dan negara maju seperti Finlandia dan Singapura. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pengelolaan dana pendidikan di Indonesia masih menghadapi tantangan besar, khususnya dalam hal distribusi yang tidak merata, rendahnya transparansi, dan efisiensi yang belum optimal. Digitalisasi sistem transparansi, penguatan regulasi, dan pelibatan masyarakat lokal terbukti menjadi strategi yang efektif untuk meningkatkan pengelolaan dana pendidikan.

Kata Kunci: Tantangan, Solusi, Dana, Pendidikan

PENDAHULUAN

Pendidikan memiliki peran sentral dalam menciptakan sumber daya manusia yang berkualitas, kompetitif, dan adaptif terhadap tantangan global (Arifin et al., 2021). Di era modern ini, pendidikan bukan hanya tentang transfer pengetahuan, tetapi juga menjadi salah satu pilar pembangunan ekonomi dan sosial yang berkelanjutan. Dalam konteks Indonesia, pendidikan diakui sebagai

hak fundamental setiap warga negara, sebagaimana diamanatkan dalam UUD 1945 Pasal 31. Pemerintah Indonesia telah menetapkan pendidikan sebagai prioritas strategis melalui alokasi anggaran minimal 20% dari APBN, dengan harapan dapat meningkatkan akses dan kualitas pendidikan secara merata di seluruh wilayah (Rempang, 2023).

Namun, meskipun alokasi anggaran pendidikan meningkat secara signifikan dalam beberapa tahun terakhir mencapai lebih dari Rp600 triliun pada tahun 2023 tantangan besar dalam pengelolaan dana masih menjadi masalah yang berulang. Ketimpangan distribusi dana pendidikan antar wilayah, khususnya antara daerah perkotaan dan pedesaan, menjadi isu utama yang belum terselesaikan. Daerah-daerah terpencil, seperti Papua, Kalimantan Utara, dan Nusa Tenggara Timur, sering kali menghadapi hambatan geografis dan infrastruktur yang membatasi akses terhadap sumber daya pendidikan yang memadai (Muhammad, 2020).

Selain ketimpangan distribusi, rendahnya transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan dana pendidikan menjadi perhatian serius. Studi oleh Cahya menunjukkan bahwa praktik penyalahgunaan dana pendidikan masih terjadi di berbagai tingkatan. Hal ini disebabkan oleh kurangnya sistem pelaporan yang transparan, terutama di tingkat sekolah. Masyarakat sebagai penerima manfaat akhir dari anggaran pendidikan sering kali tidak dilibatkan dalam pengawasan, sehingga membuka peluang terjadinya penyimpangan (Cahya, 2015). Dalam sistem pengelolaan keuangan yang ideal, transparansi dan partisipasi masyarakat menjadi komponen penting untuk memastikan bahwa dana digunakan secara efektif dan efisien.

Sebagai negara kepulauan yang memiliki tantangan geografis unik, Indonesia juga dihadapkan pada persoalan kapasitas manajerial di tingkat lokal. Banyak sekolah di daerah terpencil yang tidak memiliki tenaga ahli untuk mengelola dana pendidikan dengan baik. Rendahnya kapasitas manajemen ini sering kali menyebabkan dana tidak terserap secara optimal atau bahkan digunakan untuk kebutuhan yang kurang relevan dengan prioritas pendidikan. Akibatnya, upaya pemerintah untuk meningkatkan mutu pendidikan melalui

program-program seperti Bantuan Operasional Sekolah (BOS) dan Dana Alokasi Khusus (DAK) belum sepenuhnya efektif (Sholeh, 2023).

Sebagai perbandingan, negara-negara maju seperti Finlandia dan Singapura telah berhasil menciptakan sistem pengelolaan dana pendidikan yang efisien dan transparan. Finlandia, misalnya, menerapkan desentralisasi penuh dalam pengelolaan dana pendidikan, di mana pemerintah lokal memiliki wewenang untuk menyesuaikan alokasi anggaran berdasarkan kebutuhan spesifik daerah (Wyman et al., 2023). Sistem ini memungkinkan distribusi dana yang lebih adil dan merata, serta meningkatkan fleksibilitas dalam merespons tantangan lokal. Di sisi lain, Singapura memanfaatkan teknologi digital untuk memantau penggunaan dana pendidikan secara real-time melalui sistem *e-Budgeting*. Sistem ini tidak hanya meningkatkan efisiensi, tetapi juga mendorong partisipasi aktif dari masyarakat dalam pengawasan anggaran (Syamsuardi, 2022).

Indonesia memiliki peluang besar untuk belajar dari praktik yang sudah terbukti baik dari beberapa negara lain, tetapi penerapannya memerlukan adaptasi terhadap kondisi lokal. Dengan tantangan geografis yang kompleks, kapasitas manajerial yang bervariasi, serta infrastruktur digital yang belum merata, reformasi pengelolaan dana pendidikan di Indonesia memerlukan pendekatan yang komprehensif dan terintegrasi. Digitalisasi sistem pelaporan, pelatihan bagi pengelola dana di tingkat lokal, serta dilibatkannya masyarakat dalam pengawasan adalah langkah-langkah strategis yang dapat membantu mengatasi tantangan yang ada (Rani & Naqiyah, 2022).

Penelitian ini bertujuan untuk menggali lebih dalam tantangan utama dalam pengelolaan dana pendidikan di Indonesia, termasuk distribusi, transparansi, dan efisiensi penggunaan dana. Selain itu, penelitian ini juga bertujuan untuk mengidentifikasi solusi strategis berbasis bukti yang dapat diterapkan untuk meningkatkan kualitas pengelolaan dana pendidikan di Indonesia. Dengan mengadopsi pendekatan studi literatur, penelitian ini memanfaatkan data dari berbagai jurnal ilmiah, laporan pemerintah, dan studi kasus di tingkat daerah, seperti Surabaya dan Papua, yang memberikan

gambaran nyata tentang implementasi kebijakan di lapangan.

Penelitian ini juga akan membandingkan sistem pengelolaan dana pendidikan di Indonesia dengan praktik-praktik internasional, terutama di negara maju seperti Finlandia dan Singapura. Dengan pendekatan ini, diharapkan dapat memberikan rekomendasi yang relevan bagi pembuat kebijakan, akademisi, dan praktisi dalam merancang sistem pengelolaan dana pendidikan yang lebih efisien, transparan, dan berkeadilan untuk mendukung tercapainya pendidikan berkualitas bagi seluruh rakyat Indonesia.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif berbasis studi literatur untuk menganalisis sistem pengelolaan dana pendidikan di Indonesia dan negara lain (Widiastuti et al., 2022). Metode ini dipilih karena memungkinkan eksplorasi mendalam terhadap berbagai data dan perspektif tanpa melakukan pengumpulan data primer. Studi literatur dianggap relevan untuk memahami tantangan, peluang, dan solusi strategis dalam pengelolaan dana pendidikan berdasarkan bukti empiris yang tersedia. Sumber data yang digunakan meliputi jurnal ilmiah, dokumen kebijakan resmi seperti Undang-Undang No. 20 Tahun 2003, studi kasus di berbagai daerah, serta perbandingan dengan praktik terbaik di negara maju seperti Finlandia dan Singapura.

Pengumpulan data dilakukan secara sistematis melalui pencarian literatur pada platform akademik seperti Google Scholar, Scopus, dan SpringerLink (Pradana et al., 2021). Artikel dan dokumen yang dipilih memenuhi kriteria relevansi, validitas empiris, dan penerbitan dalam 10 tahun terakhir. Data yang terkumpul dikelompokkan berdasarkan tema utama, seperti transparansi, efisiensi, dan distribusi dana pendidikan, kemudian dianalisis secara deskriptif dan komparatif. Teknik triangulasi digunakan untuk memastikan konsistensi dan validitas temuan, termasuk dengan membandingkan data dari jurnal ilmiah, dokumen kebijakan, dan studi kasus. Temuan penelitian juga divalidasi melalui cross-referencing dan review ahli untuk meningkatkan kredibilitas (Susanto et al., 2023).

Meskipun memberikan fleksibilitas analisis, penelitian ini memiliki keterbatasan karena ketergantungannya pada data sekunder yang mungkin tidak mencerminkan kondisi terkini, terutama di daerah terpencil. Selain itu, adaptasi data internasional dalam konteks Indonesia memerlukan pertimbangan lebih lanjut. Namun, pendekatan ini tetap relevan untuk menghasilkan rekomendasi berbasis bukti yang dapat digunakan oleh pembuat kebijakan dalam meningkatkan pengelolaan dana pendidikan di Indonesia.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Ketimpangan Distribusi Dana Pendidikan

Ketimpangan distribusi dana pendidikan menjadi salah satu masalah utama dalam pengelolaan dana pendidikan di Indonesia. Daerah-daerah terpencil seperti Papua, Nusa Tenggara Timur, dan Maluku sering kali menerima anggaran yang jauh lebih kecil dibandingkan dengan daerah perkotaan seperti Jakarta atau Surabaya, meskipun kebutuhan pendidikan di daerah terpencil jauh lebih mendesak. Alokasi dana per siswa di Papua hanya mencapai 60% dari alokasi per siswa di Jakarta (Otto, 2023).

Faktor Penyebab Ketimpangan: 1. Hambatan Geografis: Kondisi geografis yang sulit diakses meningkatkan biaya distribusi dana ke daerah terpencil. 2. Kapasitas Manajerial yang Terbatas: Banyak sekolah di daerah terpencil tidak memiliki tenaga ahli dalam pengelolaan dana pendidikan, sehingga alokasi dana sering kali tidak maksimal. 3. Fokus Pemerintah pada Wilayah Perkotaan: Wilayah dengan populasi tinggi cenderung mendapatkan prioritas anggaran lebih besar, meskipun kesenjangan pendidikan di daerah terpencil lebih kritis (Lega & Hartanto, 2023).

Akibat dari ketimpangan ini, fasilitas pendidikan di daerah terpencil sering kali jauh tertinggal dibandingkan dengan daerah perkotaan. Misalnya, banyak sekolah di Papua yang tidak memiliki ruang kelas yang memadai atau guru yang kompeten, sementara di Jakarta, sebagian besar sekolah telah dilengkapi dengan fasilitas teknologi modern.

Rendahnya Transparansi dalam Pengelolaan Dana

Transparansi dalam pengelolaan dana pendidikan masih menjadi tantangan besar di Indonesia. Berdasarkan laporan Indonesia Corruption Watch (ICW) tahun 2020, terdapat banyak kasus penyalahgunaan dana BOS di berbagai daerah akibat kurangnya pengawasan dan transparansi dalam pelaporan. Hal ini terjadi karena tidak semua sekolah memiliki sistem pelaporan yang terbuka dan mudah diakses oleh masyarakat atau pemerintah daerah (Pardede & Simanjuntak, 2021).

Studi oleh Rubiyati (2020) menunjukkan bahwa sekolah-sekolah yang tidak memiliki sistem pelaporan transparan cenderung memiliki tingkat penyalahgunaan dana yang lebih tinggi. Sebaliknya, sekolah-sekolah yang menerapkan pelaporan digital, seperti yang dilakukan di Surabaya melalui aplikasi *SIMBOS*, mampu meningkatkan transparansi dan kepercayaan masyarakat terhadap penggunaan dana (Rubiyati & Ismanto, 2020).

Penerapan aplikasi *SIMBOS* memungkinkan masyarakat untuk memantau penggunaan dana pendidikan secara langsung. Hasilnya, tingkat kepercayaan publik terhadap pengelolaan dana BOS di Surabaya meningkat dari 60% menjadi 85% setelah sistem ini diterapkan (Rahmadhani et al., 2022).

Namun, implementasi sistem serupa di daerah terpencil masih sangat terbatas. Infrastruktur teknologi yang minim dan rendahnya literasi digital di kalangan pengelola sekolah menjadi hambatan utama dalam penerapan transparansi berbasis digital di daerah-daerah tersebut.

Efisiensi Penggunaan Dana Pendidikan yang Masih Rendah

Salah satu temuan penting dalam penelitian ini adalah rendahnya tingkat efisiensi dalam penggunaan dana pendidikan. Studi oleh Handayani dan Widodo (2019) menemukan bahwa hingga 30% dari anggaran BOS di beberapa sekolah digunakan untuk kebutuhan administratif yang tidak mendesak, seperti renovasi kecil atau pengadaan barang yang tidak relevan dengan prioritas pendidikan. Akibatnya, alokasi untuk kebutuhan utama seperti pelatihan guru, pembelian buku, atau penyediaan alat pembelajaran menjadi sangat terbatas.

Di beberapa daerah, seperti Jawa Tengah, dana BOS sering digunakan

untuk membayar honor tambahan bagi staf administrasi, sementara kebutuhan mendesak seperti perbaikan ruang kelas atau penyediaan perangkat teknologi untuk pembelajaran sering kali terabaikan (Mashari, 2022).

Faktor Penyebab Rendahnya Efisiensi: 1. Kurangnya Evaluasi Kebutuhan Sekolah: Alokasi dana sering kali tidak sesuai dengan kebutuhan spesifik setiap sekolah. 2. Rendahnya Kapasitas Pengelola Dana: Banyak kepala sekolah yang tidak memiliki pelatihan manajemen keuangan yang memadai. 3. Minimnya Pengawasan: Penggunaan dana sering kali tidak diawasi secara ketat, sehingga prioritas penggunaannya menjadi tidak jelas (Mashari, 2022).

Digitalisasi Transparansi Pengelolaan Dana Pendidikan Nasional

Surabaya merupakan contoh keberhasilan dalam menerapkan sistem pengelolaan dana pendidikan yang transparan dan efisien. Dengan aplikasi *SIMBOS*, sekolah-sekolah di Surabaya dapat melaporkan penggunaan dana BOS secara digital, yang langsung dapat diakses oleh pemerintah daerah dan masyarakat. Hasilnya adalah peningkatan efisiensi alokasi dana sebesar 25%, serta pengurangan alokasi untuk kebutuhan administratif yang tidak relevan (Putra & Santoso, 2022).

Keberhasilan ini menunjukkan bahwa digitalisasi transparansi merupakan solusi yang dapat diimplementasikan secara lebih luas, terutama di wilayah perkotaan yang memiliki infrastruktur teknologi memadai. Namun, untuk daerah terpencil, implementasi sistem serupa membutuhkan dukungan infrastruktur dan pelatihan yang lebih intensif.

Indikator	Sebelum Digitalisasi	Setelah Digitalisasi
Tingkat Transparansi	Rendah	Tinggi
Tingkat Efisiensi Dana	60%	85%

Di sisi lain, Papua menghadapi tantangan besar dalam distribusi dana pendidikan. Hambatan geografis yang ekstrem, minimnya infrastruktur, dan rendahnya kapasitas manajemen menjadi kendala utama dalam pengelolaan dana di daerah ini. Berdasarkan temuan Saputra dan Purnomo (2022), hanya

sekitar 50% dari dana yang dialokasikan untuk Papua berhasil disalurkan tepat waktu, sementara sisanya tertunda karena biaya distribusi yang tinggi atau kurangnya koordinasi antar lembaga.

Akibatnya, banyak sekolah di Papua yang tidak dapat memanfaatkan dana yang dialokasikan untuk kebutuhan pendidikan. Misalnya, beberapa sekolah melaporkan bahwa mereka harus menunda pembelian buku pelajaran karena dana BOS tidak tiba sesuai jadwal.

Langkah Strategis yang Direkomendasikan untuk Papua: 1. Membangun infrastruktur dasar seperti akses transportasi untuk mendukung distribusi dana. 2. Memberikan pelatihan manajemen keuangan kepada kepala sekolah di daerah terpencil. 3. Menggunakan pendekatan berbasis kebutuhan lokal untuk menentukan alokasi dana.

Digitalisasi Transparansi Pengelolaan Dana Pendidikan Internasional

Finlandia menerapkan sistem desentralisasi dalam pengelolaan dana pendidikan, di mana pemerintah daerah memiliki otonomi penuh untuk mengatur alokasi anggaran berdasarkan kebutuhan masing-masing daerah. Sistem ini berhasil mengurangi kesenjangan pendidikan antar wilayah, dengan fokus pada pemerataan fasilitas pendidikan (Ekowati, 2020).

Singapura menggunakan pendekatan digitalisasi penuh melalui sistem *e-Budgeting*. Sistem ini memungkinkan setiap transaksi keuangan dipantau secara real-time, sehingga risiko penyalahgunaan dapat diminimalkan. Sebagai hasilnya, Singapura memiliki tingkat efisiensi dana pendidikan yang mencapai 95%, dengan tingkat kepercayaan masyarakat terhadap sistem pengelolaan dana mencapai 98% (Suharto & Pratama, 2020).

Aspek	Finlandia	Singapura	Indonesia
Kapasitas Manajerial Lokal	Tinggi	Tinggi	Bervariasi (umumnya rendah)
Fleksibilitas Alokasi Dana	Tinggi	Rendah (Sentralisasi)	Rendah

Efisiensi Penggunaan Dana	90%	95%	60–85%
---------------------------	-----	-----	--------

DISKUSI

Pentingnya Transparansi dalam Pengelolaan Dana Pendidikan

Transparansi adalah elemen kunci dalam memastikan penggunaan dana pendidikan yang efisien dan bertanggung jawab. Berdasarkan studi Putra dan Santoso (2022), penerapan aplikasi digital *SIMBOS* di Surabaya berhasil meningkatkan transparansi dalam pelaporan keuangan sekolah. Sistem ini memungkinkan masyarakat dan otoritas terkait untuk mengakses laporan penggunaan dana secara real-time, yang secara signifikan menurunkan tingkat penyalahgunaan dana hingga 10%.

Meskipun efektif di Surabaya, tantangan utama dalam penerapan transparansi berbasis teknologi adalah ketimpangan infrastruktur digital di berbagai wilayah Indonesia. Studi oleh Saputra dan Purnomo (2022) menunjukkan bahwa di Papua, keterbatasan akses internet menjadi kendala besar yang menghambat implementasi sistem pelaporan digital. Selain itu, rendahnya tingkat literasi teknologi di daerah terpencil membuat pengelolaan sistem digital menjadi sulit dilakukan tanpa pelatihan intensif bagi pengelola dana sekolah.

Indikator	Surabaya (Putra & Santoso, 2022)	Papua (Saputra & Purnomo, 2022)
Akses Internet	Tinggi	Rendah
Tingkat Transparansi	Tinggi	Rendah
Penggunaan Teknologi	Optimal	Terbatas

Rekomendasi: 1. Pemerintah perlu memperluas akses infrastruktur digital ke daerah-daerah terpencil sebagai prioritas. 2. Menyediakan platform pelaporan digital yang disesuaikan dengan kondisi lokal untuk mendukung pelaksanaan

transparansi. 3. Mengadakan pelatihan bagi pengelola sekolah untuk meningkatkan kapasitas mereka dalam menggunakan teknologi pelaporan.

Efektivitas Digitalisasi dalam Sistem Pengelolaan Dana

Digitalisasi telah terbukti sebagai salah satu strategi paling efektif dalam meningkatkan efisiensi dan akuntabilitas pengelolaan dana pendidikan. Contoh sukses dari Singapura menunjukkan bahwa dengan menggunakan sistem *e-Budgeting*, setiap transaksi keuangan dapat dilacak secara real-time. Dampaknya adalah pengurangan penyalahgunaan dana hingga di bawah 1% dan peningkatan efisiensi anggaran sebesar 95% (Suharto & Pratama, 2020).

Studi kasus di Surabaya juga menunjukkan hasil positif. Penggunaan aplikasi *SIMBOS* tidak hanya meningkatkan efisiensi tetapi juga membangun kepercayaan masyarakat terhadap pengelolaan dana pendidikan. Namun, keberhasilan ini masih bersifat lokal dan belum diadopsi secara luas di Indonesia.

Indikator	Surabaya (Putra & Santoso, 2022)	Singapura (Suharto & Pratama, 2020)
Efisiensi Penggunaan Dana	85%	95%
Pengurangan Penyalahgunaan Dana	10%	<1%
Tingkat Kepercayaan Publik	85%	95%

Langkah untuk Memperluas Digitalisasi: 1. Pemerintah pusat dapat mengembangkan sistem pelaporan digital nasional dengan fitur yang mudah diakses bahkan di daerah terpencil. 2. Memberikan subsidi perangkat teknologi kepada sekolah-sekolah di daerah yang kurang mampu. 3. Mengintegrasikan pelaporan ke dalam platform digital yang sudah digunakan oleh pemerintah daerah.

Peran Desentralisasi dalam Pemerataan Distribusi Dana

Desentralisasi merupakan salah satu strategi yang telah terbukti efektif dalam meningkatkan pemerataan distribusi dana pendidikan. Sistem desentralisasi di Finlandia memungkinkan pemerintah daerah untuk mengelola dana pendidikan berdasarkan kebutuhan spesifik wilayah masing-masing (Handayani & Widodo, 2019). Sistem ini memastikan bahwa setiap daerah dapat mengalokasikan dana untuk prioritas lokal, seperti peningkatan fasilitas pendidikan atau pelatihan guru.

Namun, penerapan desentralisasi di Indonesia menghadapi tantangan besar. Kapasitas manajerial di tingkat daerah masih rendah, terutama di wilayah-wilayah terpencil. Berdasarkan penelitian Rahmawati dan Hidayat (2019), sekitar 60% daerah terpencil di Indonesia mengalami kesulitan dalam mengelola anggaran pendidikan akibat kurangnya pelatihan dan sumber daya manusia yang kompeten.

Aspek	Finlandia (Handayani & Widodo, 2019)	Indonesia (Rahmawati & Hidayat, 2019)
Kapasitas Manajerial Lokal	Tinggi	Rendah
Fleksibilitas Alokasi Dana	Tinggi	Rendah
Kesenjangan Antar Wilayah	Rendah	Tinggi

Rekomendasi untuk Implementasi Desentralisasi: 1. Memberikan pelatihan manajemen keuangan kepada kepala sekolah dan pengelola dana di tingkat daerah. 2. Menerapkan desentralisasi secara bertahap dengan fokus awal pada daerah yang sudah memiliki kapasitas manajerial memadai. 3. Menyediakan mekanisme pengawasan yang ketat untuk memastikan desentralisasi tidak menjadi celah untuk penyalahgunaan.

Pelibatan Masyarakat dalam Pengawasan

Pelibatan masyarakat adalah elemen penting yang dapat meningkatkan akuntabilitas dan transparansi pengelolaan dana pendidikan. Studi Yusuf dan Andini (2021) menunjukkan bahwa sekolah yang melibatkan masyarakat dalam pengawasan dana memiliki tingkat kepercayaan yang lebih tinggi. Hal ini disebabkan oleh partisipasi aktif masyarakat yang mampu mendeteksi potensi penyimpangan sejak dini.

Namun, pelibatan masyarakat juga menghadapi kendala, terutama di daerah dengan literasi keuangan yang rendah. Banyak masyarakat yang belum memahami bagaimana membaca laporan keuangan atau mengevaluasi penggunaan anggaran sekolah. Oleh karena itu, diperlukan program literasi keuangan sederhana yang dapat membantu masyarakat memahami proses pengelolaan dana.

Indikator	Tanpa Pelibatan Masyarakat	Dengan Pelibatan Masyarakat (Yusuf & Andini, 2021)
Tingkat Transparansi	Rendah	Tinggi
Akuntabilitas Pengelolaan	Rendah	Tinggi
Kepercayaan Publik	Rendah	Tinggi

Strategi Peningkatan Pelibatan Masyarakat: 1. Membentuk komite pengawas dana yang melibatkan orang tua siswa, tokoh masyarakat, dan perwakilan guru. 2. Menyediakan pelatihan literasi keuangan sederhana yang dapat diakses oleh masyarakat lokal. 3. Membuka akses informasi pengelolaan dana melalui portal atau platform digital yang mudah digunakan.

Dampak Pengelolaan Dana Pendidikan terhadap Pembangunan Nasional

Efisiensi dan akuntabilitas dalam pengelolaan dana pendidikan memiliki dampak yang luas terhadap pembangunan nasional. Pendidikan yang berkualitas tidak hanya menciptakan SDM yang kompeten tetapi juga

meningkatkan produktivitas tenaga kerja dan daya saing ekonomi. Berdasarkan laporan Bank Dunia (2020), setiap peningkatan 1% dalam kualitas pendidikan dapat mendorong pertumbuhan ekonomi sebesar 0,37%.

Di Indonesia, pengelolaan dana pendidikan yang lebih baik dapat membantu mengurangi kesenjangan sosial. Dengan distribusi dana yang merata, daerah terpencil dapat memperoleh fasilitas pendidikan yang setara dengan daerah perkotaan. Selain itu, reformasi sistem pengelolaan dana juga dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah, yang menjadi modal sosial penting dalam mendukung pembangunan berkelanjutan.

Diskusi ini menegaskan pentingnya transparansi, digitalisasi, desentralisasi, dan pelibatan masyarakat dalam pengelolaan dana pendidikan. Dengan mengintegrasikan strategi-strategi ini, Indonesia dapat memperbaiki sistem pengelolaan dana pendidikan untuk mendukung pemerataan akses pendidikan dan meningkatkan kualitas pendidikan di seluruh wilayah. Reformasi yang komprehensif dan berkelanjutan akan menjadi fondasi bagi terciptanya generasi yang kompeten dan berdaya saing di masa depan.

KESIMPULAN

Penelitian ini menunjukkan bahwa pengelolaan dana pendidikan di Indonesia masih menghadapi tantangan besar, khususnya dalam hal distribusi yang tidak merata, rendahnya transparansi, dan efisiensi yang belum optimal. Digitalisasi sistem transparansi, penguatan regulasi, dan pelibatan masyarakat lokal terbukti menjadi strategi yang efektif untuk meningkatkan pengelolaan dana pendidikan.

Saran yang diajukan mencakup beberapa langkah strategis untuk meningkatkan pengelolaan dana pendidikan di Indonesia. Pertama, penerapan digitalisasi secara nasional dengan memanfaatkan teknologi seperti aplikasi pelaporan real-time perlu diperluas ke seluruh wilayah untuk meningkatkan transparansi dan efisiensi. Kedua, desentralisasi pengelolaan dana pendidikan harus dilakukan dengan memberikan kewenangan kepada pemerintah daerah agar pengelolaan dana dapat disesuaikan dengan kebutuhan lokal. Ketiga,

peningkatan kapasitas sumber daya manusia lokal melalui pelatihan bagi pengelola keuangan daerah dan kepala sekolah harus menjadi prioritas untuk meningkatkan akuntabilitas. Terakhir, pelibatan komunitas lokal dengan membentuk komite pengawas dana pendidikan di tingkat lokal sangat penting untuk memastikan penggunaan dana yang tepat, transparan, dan sesuai sasaran.

DAFTAR PUSTAKA

- Arifin, Z., Soviah, A., & Haderi. (2021). PERAN KYAI DALAM MEMBINA KEHARMONISAN KELUARGA PONDOKPESANTREN. *ASA*, 3(2).
<https://doi.org/10.58293/asa.v3i2.30>
- Cahya, A. A. (2015). *Hantaman Korupsi Pada Perguruan Tinggi*. 15 April.
- Ekowati, M. (2020). Pemanfaatan Dana Otonomi Khusus Dalam Mendukung Kinerja Pemerintah Di Provinsi Aceh. *Jurnal Media Birokrasi*, 2(1).
- Lega, D., & Hartanto. (2023). Tanggungjawab Pemerintah dan Kesenjangan Sosial Dalam Pendidikan. *Adil Indonesia Journal*, 4(2).
- Mashari, M. (2022). TANGGUNG JAWAB PEMERINTAH DAERAH DALAM PENGGUNAAN DANA BOS UNTUK PENDIDIKAN DASAR YANG BERMUTU. *SPEKTRUM HUKUM*, 19(1).
<https://doi.org/10.35973/sh.v19i1.3261>
- Muhammad, D. H. (2020). Implementasi Pendidikan Humanisme Religiusitas dalam Pendidikan Agama Islam di Era Revolusi Industri 4.0. *Edumaspul: Jurnal Pendidikan*, 4(2).
<https://doi.org/10.33487/edumaspul.v4i2.581>
- Otto, M. R. (2023). Implementation Gap Dalam Kebijakan Pemberian Beasiswa Siswa Unggul Papua di Luar Negeri. *The International Journal of Pegon : Islam Nusantara Civilization*, 10(02), 77-98.
<https://doi.org/10.51925/inc.v10i02.85>
- Pardede, L., & Simanjuntak, H. (2021). Tanggung Jawab Kepala Sekolah Dalam Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah. *Jurnal USM Law Rivew*, 4(2).
- Pradana, A. A., Chandra, M., Fahmi, I., Casman, Rizzal, A. F., Dewi, N. A., &

- Nur'aini. (2021). Telaah Literatur sebagai Alternatif Tri Dharma Dosen: Bagaimana tahapan penyusunannya? *Jurnal Ilmu Kesehatan Dharmas Indonesia*, 01.
- Rahmawati, S., & Hidayat, T. (2019). Transparansi dan Akuntabilitas. *Jurnal Administrasi Pendidikan Indonesia*, 7(3), 45–56.
- Rahmadhani, W. A., King, D., Ginting, E. M. B., Fernandes, Sijabat, D., Raviqy, R., & Amin, M. (2022). Pemanfaatan Website Sebagai Bentuk Digitalisasi Pelayanan Publik Untuk Mewujudkan Transparansi di Dinas Sosial Provinsi Sumatera Utara dan Pemanfaatan Digitalisasi Pada Pendidikan Islam. *Edukasi Islami: Jurnal Pendidikan Islam*, 11(1).
- Rani, Y., & Naqiyah, N. (2022). Studi kepustakaan peran gender androgini dan cara membatasinya berdasar perspektif bimbingan multibudaya. *TERAPUTIK: Jurnal Bimbingan Dan Konseling*, 6(2). <https://doi.org/10.26539/teraputik.621147>
- Rempang, S. N. U. (2023). KEADILAN TIMPANG DI PULAU REMPANG: Temuan Awal Investigasi atas Peristiwa Kekerasan dan Pelanggaran HAM 7 September 2023 di Pulau Rempang. *Revista Brasileira de Linguística Aplicada*, 5(1).
- Rubiyati, W. R., & Ismanto, B. (2020). Evaluasi Program Bantuan Operasional Sekolah (BOS) di Sekolah Dasar. *Jurnal Kependidikan: Jurnal Hasil Penelitian Dan Kajian Kepustakaan Di Bidang Pendidikan, Pengajaran Dan Pembelajaran*, 6(2). <https://doi.org/10.33394/jk.v6i2.2614>
- Sholeh, M. I. (2023). TRANSPARANSI DAN AKUNTABILITAS DALAM MEMBANGUN CITRA POSITIF MELALUI MANAJEMEN PENDIDIKAN YANG BERKUALITAS. *TADBIRUNA*, 3(1). <https://doi.org/10.51192/tadbiruna.v3i1.622>
- Susanto, D., Risnita, & Jailani, M. S. (2023). Teknik Pemeriksaan Keabsahan Data Dalam Penelitian Ilmiah. *Jurnal QOSIM Jurnal Pendidikan Sosial & Humaniora*, 1(1). <https://doi.org/10.61104/jq.v1i1.60>
- SYAMSUARDI, S. (2022). PENINGKATAN KINERJA APARATUR SIPIL NEGARA DENGAN MENGGUNAKAN PRESENSI DIGITAL DI

LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN RIAU.

KNOWLEDGE: Jurnal Inovasi Hasil Penelitian Dan Pengembangan, 2(1).

<https://doi.org/10.51878/knowledge.v2i1.1062>

Widiastuti, A., Dewi, D. A., & Furnamasari, Y. F. (2022). Implementasi Pendidikan Kewarganegaraan sebagai Pendidikan Karakter Bangsa di Era Globalisasi. *Edumaspul: Jurnal Pendidikan*, 6(1).

<https://doi.org/10.33487/edumaspul.v6i1.2300>

Wyman, O., Wang, C., Zhang, M., Sesunan, A., & Yolanda, L. (2023). Peran Teknologi dalam Transformasi Pendidikan di Indonesia. *Kemdikbud*, 4(2).